



SIARAN PERS

BKPM Gelar Market Sounding Proyek KPBU: Pengembangan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa

Jakarta, 20 Desember 2018 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek KPBU: Pengembangan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa. Proyek ini merupakan revitalisasi UPPKB dengan total investasi sekitar Rp 330,6 Miliar. Dalam acara yang digelar di Ruang Nusantara, BKPM, hadir sekitar 90 peserta yang meliputi investor di bidang terkait, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi terkait dari dalam dan luar negeri.

Proyek ini merupakan revitalisasi UPPKB melalui pengembangan enam jembatan timbang di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa (tiga UPPKB Pulau Sumatera: Muara Tembesi, Merapi dan Blambangan Umpu dan tiga UPPKB Pulau Jawa: Tanjung, Subah dan Guyangan) sesuai dengan standar peraturan berlaku menggunakan skema KPBU. Dengan pengembalian investasi berasal dari *Avalaibility Payment* (AP) selama masa konsesi 15 tahun. Proyek ini juga direncanakan akan mendapatkan penjaminan pemerintah (*Government Guarantee*) melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dengan lingkup jaminan berupa kepastian pembayaran AP serta resiko politik dan regulasi.

Dalam sambutan pembukaannya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Ikmal Lukman menyampaikan bahwa pengembangan UPPKB bertujuan bukan semata-mata untuk membangun dan mengadakan fasilitas pendukung operasional jembatan timbang, namun juga mengoptimalkan fungsi UPPKB dalam pengawasan, penindakan, dan pencatatan atas kendaraan bermotor tipe angkut muat untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan menjaga kondisi infrastruktur jalan.

“Pemilihan skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur ini tidak hanya atas pertimbangan efisiensi anggaran semata, yang lebih penting adalah pemanfaatan partisipasi swasta dalam menyajikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat dengan memanfaatkan keahlian dalam penggunaan teknologi dan pengalaman yang dimiliki,” jelasnya, usai acara Market Sounding di Jakarta, Kamis (20/12).

Sementara itu, Direktur Prasarana Darat Kementerian Perhubungan Chandra Irawan dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini Kementerian Perhubungan akan melakukan pengembangan UPPKB melalui skema KPBU meliputi enam lokasi, yaitu: UPPKB Tanjung Kab. Brebes, UPPKB Subah Kab. Batang, UPPKB Guyangan Kab. Nganjuk, UPPKB Blambangan Umpu Kab. Lampung Utara, UPPKB Merapi Kab. Lahat dan UPPKB Muara Tembesi Kab. Batanghari.

“Pengembangan UPPKB ini akan disesuaikan menuju standar pelayanan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor dan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No. SK 736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan,” jelas Chandra. Rencana pengembangan UPPKB ini juga akan dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi yang handal yang akan terkoneksi dengan sistem data terpusat Kementerian Perhubungan.

Kepala Sub Direktorat Prasarana Penimbangan Kendaraan Bermotor Iman Sukandar menjelaskan bahwa cakupan pekerjaan Pengembangan UPPKB di Pulau Sumatera dan Jawa, diantaranya adalah mendesain, membiayai, dan membangun UPPKB di enam lokasi di Pulau Sumatera dan Jawa, serta pengadaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang terkait pengoperasian UPPKB.

Fasilitas utama UPPKB terdiri dari bangunan kantor, landasan penimbangan, bangunan penindakan pelanggaran, *Weight in Motion* (WiM), serta penimbangan dan penurunan muatan. Tahap prakualifikasi proyek akan dilakukan sekitar kwartal II Tahun 2019,” ujar Iman.

Market Sounding kali ini merupakan Market Sounding pertama dengan maksud memberikan *feedback* terhadap penyusunan pra studi kelayakan/ Outline Business Case (OBC) yang kemudian akan menjadi masukan dalam penyusunan Final Business Case (FBC) proyek tersebut.

Beberapa perusahaan yang hadir, antara lain: PT Astra, PT Sojitz, PT Nindya Karya, PT Penta-Ocean Construction, PT Metler Toledo, PT Nindya Karya (Persero), Mitsubishi Corporation, BAS Logistics (Sinarmas Group), PT. Jababeka Infrastruktur, Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), PT Waticakra, SGMW Motor, Itochu, KAJIMA Corp dan perusahaan lainnya. Turut hadir perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS dan PT PII, yang mewakili Kantor Bersama KPBU dan menyampaikan informasi terkait dengan skema KPBU dan penjaminan pemerintah.

--Selesai--

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi:

Chandra Irawan

Direktur Prasarana Darat Kementerian Perhubungan
Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat No.8, RT.2/RW.3, Gambir
Telp/ email : bimbingankepengusahaan@gmail.com

Hedy Satrya Putera

Direktur Perencanaan Infrastruktur BKPM
Alamat: Gedung Suhartoyo Lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto No.44, Jakarta
Telp. / e-mail: 021-525-2008 ext. 3704 / tu.ditpi@bkpm.go.id

Sri Bagus Guritno

Direktur Kerjasama-Pemerintah dan Rancang Bangun Bappenas
Alamat: Direktorat KPSRB Gedung Baru Lantai 4, Jl. Taman Suropati No. 2, Menteng Jakarta Pusat
Telp. / e-mail: 021- 3193-4175 / pkps@bappenas.go.id

Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Eksekutif Bisnis PT PII (Persero)
Alamat: Capital Place Building, 7-8th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.18, Jakarta
Telp. / e-mail: 021-5795-0550 / info@iigf.co.id

LET'S CONNECT

Follow us on



@bkpm

Join our fanpage



FanpageBKPM

Subscribe our channel



THEBKPMVIDEO

Join our network



Indonesia Investment
Coordinating Board
(BKPM)

Find us



@BKPM_ID